



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Telp/Fax (0526) 2028114 Paringin 71611
dpmtsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.46/ 017 /SK/DPMPTSP/TAHUN 2024

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.46/069/SK/DPMPTSPTTK/TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas,

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU NOMOR : 188.46/017/DPMPTSP-
 BLG/ TAHUN 2024
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DAN INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Adanya indikator ini untuk mengetahui besaran Investasi di Daerah baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) Angka realisasi investasi dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan.	Kepala SKPD	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha/ Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam berinvestasi di Kabupaten Balangan Nilai didapat dari hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha yang dikeluarkan oleh BKPM/Kementerian Investasi RI	Kepala SKPD	Nilai Kinerja PTSP dan PPB oleh BKPM

KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 197102281997021002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 188.46/017/DPMPTSP-BLG/
 TAHUN 2024
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
 INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA SKPD TAHUN 2021-2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Untuk mengetahui Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Sekretaris	LHE AKIP
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Untuk mengetahui sejauhmana kondisi sarana dan prasarana penunjang SKPD	Sekretaris	Data Aset

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	Mengetahui sector investasi baru yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan iklim investasi	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Potensi
2	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajibannya Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM/ Jumlah Pelaku usaha yang wajib melaporkan x 100%	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	OSS
3	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Mengetahui sejauhmana minat investasi dan besaran rencana investasi di Kabupaten	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Data NIB/ Perizinan Berusaha

			Balangan Nilai Persetujuan Investasi dari pendaftaran NIB		
--	--	--	---	--	--

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan	Mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik/Jumlah data dan informasi Penanaman Modal x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Layanan Administrasi Keuangan yang Baik		SIPANDA/SI PD RI

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Terfasilitasinya kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	SILKA
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi	Persentase Layanan Administrasi	Terfasilitasinya kebutuhan		Bagian Umum dan Kepegawaian

	Umum Perangkat Daerah	Umum Perangkat Daerah yang Baik	Administrasi Umum Perangkat Daerah Sehingga kegiatan pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar		
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Terfasilitasinya kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan		
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	Terfasilitasinya kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan baik Sehingga kegiatan pelayanan operasional dapat berjalan dengan lancar		
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan baik		

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (Berinvestasi)	Mengetahui Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Data dan Informasi
2	Tersedianya Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Mengetahui Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Peta Potensi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	LKPM
2	Meningkatnya Potensi/Proyek Investasi yang	Jumlah Proyek Investasi yang Siap	Mengetahui Jumlah Proyek Investasi yang	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola	Dokumen IPRO

	Siap Ditawarkan	Ditawarkan	Siap Ditawarkan	Penanaman Modal	
--	-----------------	------------	-----------------	-----------------	--

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Jumlah izin seusi SOP/ Jumlah permohonan perizinan x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	OSS / Si Cantik
2	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi / Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan x 100%	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	OSS / Si Cantik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Produk Hukum Daerah Terkait Kemudahan Investasi	Jumlah Peraturan Daerah Terkait Pemberian Kemudahan Investasi	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Perda/ Perkada
2	Terfasilitasinya Kemitraan bagi Pelaku Usaha	Jumlah Kesepakatan Kemitraan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah)	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Kerjasama

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen RUPM
2	Terlaksananya Identifikasi Potensi Investasi	Jumlah Potensi Investasi yang Diidentifikasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Peta Potensi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksananya	Jumlah	Jumlah Pelaku	JF Analis	OSS

	Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha yang Menadapatkan Pembinaan	Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	
2	Terlaksanannya Pengawasan Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Dilakukan Pengawasan dan Pemantauan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	OSS

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peta Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Dokumen Strategi
2	Terlaksanannya Promosi Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	JF Analis Kebijakan / JF Penata Kelola Penanaman Modal	Laporan

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terlaksanannya Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	JF Analis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi Komitmen Perizinannya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi
3	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diolah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	JF Analisis Kebijakan / JF Penata Perizinan	Data dan Informasi

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002